

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS,
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi kasus pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI



**Nama : Ananda Nicolla
Nim : 222015313**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS,
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi kasus pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Ananda Nicolla
Nim : 222015313**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas,
Tranparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi
Kasus Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)

Nama : Ananda Nicolla

Nim : 22 2015 313

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I,

Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

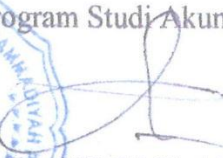
Pembimbing II,

M.Fahmi, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0029097804

Mengetahui

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi




Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ananda Nicolla
NIM : 22 2015 313
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Palembang Provinsi Sumatera Selatan)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan orang lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Palembang, Agustus 2019

 Ananda Nicolla
NIM: 22 2015 313

ABSTRAK

Ananda Nicolla/22 2015 313/2019/Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Populasi dalam penelitian adalah seluruh karyawan BPKAD Kota Palembang dengan jumlah responden 95 karyawan. Sampel yang digunakan berjumlah 49 dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama diperoleh hasil pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi signifikan memengaruhi kinerja pemerintah. Hasil uji secara parsial pengawasan keuangan daerah signifikan memengaruhi kinerja pemerintah. Akuntabilitas tidak dan Transparansi secara parsial tidak memengaruhi kinerja pemerintah.

Kata Kunci : Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah

abstract

ananda nicolla / 22 2015 313 / 2019 / The Influence of Regional Financial Supervision, accountability and transparency on government performance .

The objective of this study was to find out the influence of Regional Financial Supervision, accountability and transparency on government performance. this study was an associative research. The data used were secondary and primary data. The population in the study was all the staff of BPKAD Palembang, the number of respond was 95 employees. The samples used were 49 by using the slovin formula. the data collection technique used was a questionnaire. The data analysis methods used in this study were quantitative analysis and qualitative analysis. The result showed that simultaneously, regional financial supervision, accountability. The result of partial test showed that regional financial supervision gave an influence on government performance. the partial test results of regional financial supervision significantly influence government performance. no accountability and transparency do not partially agave an influence on government performance .

keywords: regional financial oversight, accountability, transparency, government performance

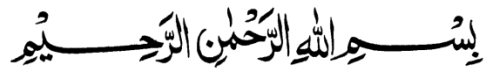
PENGESAHAN

NO. 585 / Abstract / LB / UMP / VIII / 20 19

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang



PRAKATA

Assalamualaikum, wr.wb

Alhamdulillah Robbil'alamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi kasus pada BPKAD Palembang Provinsi Sumatera Selatan)”** sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Fokus utama dari kinerja pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi merupakan indikator yang baik untuk menentukan atau menilai kemampuan BPKAD dalam menghasilkan sebuah kinerja pemerintah daerah yang baik di masa yang akan datang. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan terutama kepada orang tua Ayahanda saya Bapak Ferlianto dan Ibunda saya Sumiati S.Pd serta keluarga yang doa dan bantuan memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.CA dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si. yang

telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang. Beserta staf dan karyawan
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan ,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.CA selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus dosen pembimbing akademik saya dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para staf dan karyawan
5. Serta seluruh anggota atau karyawan di BPKAD Provinsi Palembang yang telah membantu dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terimakasih.

Palembang, Agustus 2019

Ananda Nicolla

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMERIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori.....	8
B. Penelitian Sebelumnya.....	21
C. Kerangka Berpikir.....	26
D. Hipotesis	26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
--------------------------	----

B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Operasionalisasi Variabel.....	29
D. Populasi dan Sampel	31
E. Data yang Diperlukan	31
F. Metode Pengumpulan Data	31
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	33

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	73

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	79
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------------	----

LAMPIRAN.....	84
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Persamaan dan Perbandingan Penelitian	25
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	29
Tabel IV.1 Responden Berdasarkan Usia	41
Tabel IV.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel IV.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	42
Tabel IV.4 Responden Berdasarkan Jabatan	42
Tabel IV.5 Responden Berdasarkan Lama Bekerja	43
Tabel IV.6 Data Penelitian	43
Tabel IV.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Pengawasan	46
Tabel IV.8 Rekapitulasi Jawaban Responden Pengawasan	47
Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Pengawasan	48
Tabel IV.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Pengawasan	49
Tabel IV.11 Rekapitulasi Jawaban Responden Akuntabilitas	50
Tabel IV.12 Rekapitulasi Jawaban Responden Akuntabilitas	51
Tabel IV.13 Rekapitulasi Jawaban Responden Akuntabilitas	52
Tabel IV.14 Rekapitulasi Jawaban Responden Akuntabilitas	53
Tabel IV.15 Rekapitulasi Jawaban Responden Akuntabilitas	54
Tabel IV.16 Rekapitulasi Jawaban Responden Transparansi	55
Tabel IV.17 Rekapitulasi Jawaban Responden Transparansi	56
Tabel IV.18 Rekapitulasi Jawaban Responden Transparansi	57
Tabel IV.19 Rekapitulasi Jawaban Responden Kinerja	58
Tabel IV.20 Rekapitulasi Jawaban Responden Kinerja	59
Tabel IV.21 Rekapitulasi Jawaban Responden Kinerja	60
Tabel IV.22 Rekapitulasi Jawaban Responden Kinerja	61
Tabel IV.23 Rekapitulasi Jawaban Responden Kinerja	61
Tabel IV.24 Hasil Uji Validitas	63
Tabel IV.25 Hasil Uji Reliabilitas	64
Tabel IV.26 Hasil Uji Multikolinieritas	66

Tabel IV.27 Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel IV.28 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	69
Tabel IV.29 Hasil Uji Secara Bersama-sama.....	70
Tabel IV.30 Hasil Uji Secara Parsial	71
Tabel IV.31 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik IV.1 Hasil Uji Normalitas Data	65
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar IV.1 Scatterplot (Hasil Uji Heterokedastisitas).....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Tabulasi
Lampiran 3	Interval Data
Lampiran 4	Karakteristik Responden
Lampiran 5	Frekuensi Pernyataan
Lampiran 6	Uji Validitas dan Reability
Lampiran 7	Hasil Pengolahan SPSS
Lampiran 8	Tabel R
Lampiran 9	Tabel F
Lampiran 10	Tabel t
Lampiran 11	Sertifikat Toefl
Lampiran 12	Surat Riset Penelitian
Lampiran 13	Sertifikat Hafalan AIK
Lampiran 14	Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 15	Biodata Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Kabupaten/Kota membawa konsekuensi perubahan pada pola dan system pengawasan yang mendasar dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Mohamad, 2016: 4). Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ihyaul, 2017: 20).

Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan

kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas, transparansi. Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat.

Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurut Baldrick (2017:63). Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan, sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Adanya pengawasan yang baik akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik. Di satu sisi akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-

hak publik (Abdul, 2016: 56). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Muindro, 2015: 14). Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Selain akuntabilitas diperlukan juga transparansi dalam kinerja pemerintah. Selain itu tuntutan sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan informasi terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi hak-hak public dalam halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi yang terbuka, yang sesuai dan jujur kepada public sesuai dengan perundang-undangan. Menurut (Abdul, 2016: 56).

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah adalah buruknya kinerja pelayanan publik. Keluhan masyarakat beberapa tahun terakhir yang berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik yang menduduki peringkat pertama masih keluhan mengenai kinerja pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi atas pemeriksaan ikhtisar laporan keuangan BPK selama tahun 2018 yaitu terjadinya kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan yang terjadi pada pemerintah Kota Palembang yaitu bagian laba Pemkot Palembang atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Musi yang belum diterima sebesar Rp.15,29 miliar dan pendapatan pajak dan retribusi yang belum dikenakan bunga keterlambatan belum optimal pemungutannya dan pencairan jaminan pelaksanaan pembangunan gedung sebesar Rp. 1,21 miliar (IHPS 1 BPK tahun 2018).

Sistem pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dana, sehingga menyebabkan kerugian negara atas kasus korupsi pengadaan lift kantor BPKAD Palembang dengan nilai pagu Rp.1,4 miliar di tahun 2016 lalu. Hal ini mulai terungkap saat dilakukan pengujian oleh saksi. Lift yang seharusnya dipasang adalah produk Jerman, namun yang terpasang diketahui lift produk asal China (Detik News.com). Mengindikasikan bahwa dalam proses penggunaan dana, tidak ada pertanggungjawaban dan transparansi yang jelas yang menyebabkan pengawasan keuangan pemerintah daerah semakin melemah.

Penerapan transparansi pada setiap perangkat daerah belum maksimal. Hal ini disebabkan banyak akses internet yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat membutuhkan informasi tersebut masyarakat harus ke kantor terlebih dahulu. Meningkatkan kinerja pemerintah dengan baik dengan melakukannya keterbukaan informasi yang relevan maupun akurat. Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah. Langkah yang diambil untuk *Open Government Indonesia* (OGI) adalah dengan melanjutkan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif

sehingga dalam kinerja pemerintah diharapkan meningkat.(Yessy Mayasari, Bidang Sekretariat)

Kurangnya pertanggungjawaban pemerintah dalam setiap anggaran dan realisasi yang dicapai dalam setiap kegiatan. Pemerintah selalu memberikan penjelasan pada masyarakat yang tidak masuk akal atau sulit dicerna oleh masyarakat. Masyarakat kurang yakin atas pendapat yang diberikan oleh pemerintah setempat, sehingga membuat masyarakat tidak puas atas pertanggungjawaban yang diberikan pihak pemerintah atas kegiatan yang diselenggarakan dengan anggaran dana yang tidak terhitung nilainya. (Yessy Mayasari, Bidang Sekretaria)

Penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh Fifit dan Nadirsyah (2016) hasil penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian dari Risdhayanti, dkk (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Sama halnya dengan penelitian dari Hari dan Muhammad (2016) yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian dari Nopriansyah, dkk (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, namun berbeda dari Penelitian Shinta, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan di dinas pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian dari Nopriansyah, dkk (2016) menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan penelitian dari Lucy, dkk (2014) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah peneliti, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Manfaat bagi BPKAD Palembang

Bagi kantor BPKAD Palembang diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

3. Manfaat bagi almamater

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Abdul Halim, dan Iqbal M. 2015. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah dan Diandra Pepi Vabiani. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis - Vol 10 No 1, hal 1-11*. <http://ejournal.upi.edu/index.php/mdb>
- Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Budi. 2015. Pengaruh Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/5239>
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Vol 8. NO 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/16036>
- Fifit Purnama dan Nadirsyah. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1. No. 2. Halaman 01-15. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/743>
- Hari Eka Setiyawan dan Muhammad Safri. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol.4. No.1. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/3533>
- Hermin Arifianti, Payamta dan Sutaryo. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XVI, hal 1-29*. <https://sutaryo.fe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/sutaryo-sna-16-artikel-2.pdf>
- Ihyaul Ulum. 2017. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Indra Bastian. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Kerangka Konseptual, Standar Akuntabilitas Pemerintah. 2015
- Kristianten. 2016. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Lucy Auditya, Husaini, Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*. Volume 3, Nomor 1, 2013: 21-41.
<http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/ATESTASI/article/view/39>
- Mahmudi. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI : Yogyakarta.
- Mohamad Mahsun. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE : Yogyakarta.
- Muindro Renyowijoyo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nopriansyah Putra, Erlina, Tapi Anda Sari. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara. Vol 19. No 4. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/705>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2014
- Risdhayanti Nur Sholikhah, Dewi Saptantinah Puji Astuti, dan Muhammad Rofiq Sunarko. (2016). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor DPPKAD Kabup Boyolali). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 12. Halaman: 168 – 175. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1229>
- Shinta Turalaki, Jantje J. Tinangon, dan Heinze R. N. Wokas. (2017). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol.5 No. 2. Hal. 1182 –1192. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16145>
- Siagian Sondang P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan Keempat belas*, Jakarta: Bumi Aksara,.

- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT ALFABETA :Bandung
- Terry, George R dan Leslie W.Rue. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen*, penerjemah G.A Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Uma Sekaran. 2017. *Research Methods for business*. Edisi dan 2. Salemba Empat : Jakarta
- V. Wiratna Surjarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press/